



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah Nomor 10, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh 23242, www.pt-nad.go.id, pt.bandaaceh@gmail.com

Nomor : 2896/KPT.W1-U/OT1.6/XI/2025 Banda Aceh, 13 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Analisa Pengisian Aplikasi Si-MASku
Triwulan III Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 3032/KPT.W1-U/SK.HM1.1/IX/2024 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Si-MASku) Versi 2.1, telah dilaksanakan analisa terhadap dokumen yang diunggah pada aplikasi dimaksud. Terhadap hal tersebut, dihimbau kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk :

1. agar melakukan pemantauan capaian kinerja dan upaya-upaya untuk mencapai target kinerja dengan seksama melalui penyampaian berita acara monev capaian kinerja yang akurat, lengkap, dan memiliki penjelasan yang memadai;
2. agar memantau perbaikan terhadap analisa yang dilampirkan pada surat ini sehingga terwujud pelaporan pemantauan dan kinerja yang lebih baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

NURSYAM

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN APLIKASI SIMASKU
UNTUK PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PERIODE TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2025**

No	UNIT KERJA	SS Aplikasi Komdanas	Dokumen Rapat	BA Capaian Kinerja	Laporan Hasil Tindak Lanjut	Monev Renaksi	Cetakan Excel data Perkara
1	PN Banda Aceh	√	√	1. BA Capaian Kinerja belum secara rinci menginformasikan realisasi, capaian dan data perkara selama TW III, BA juga tidak memberikan informasi terkait IKM; 2. BA hanya menginformasikan rekomendasi perbaikan untuk indikator yang gagal mencapai target namun tidak memberikan analisa penyebab keberhasilan untuk indikator yang berhasil mencapai target.	Target pelaksanaan tindak lanjut monev tidak spesifik untuk Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	√	Excel telah digunakan untuk mengumpulkan data perkara namun tidak digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan membandingkan capaian dengan target jangka menengah sesuai tahun renstra
2	PN Sabang	SS Komdanas sudah ada namun nilai realisasi dan hasil capaian triwulan III yang diinput pada aplikasi Simasku diragukan setelah menganalisa dokumen pendukung	Notulen rapat monev TW 3 sudah ada namun berdasarkan notulen tersebut masih terdapat indikator yang tidak tercapai tetapi tidak dilakukan analisa keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi untuk target tersebut	1. Nilai capaian kinerja masih diragukan karena masih terdapat perhitungan capaian kinerja yang belum sesuai dengan SK Sekma No 173 Tahun 2022 yaitu indikator perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi dan beberapa indikator diketahui tidak ada perkara yang masuk/diajukan namun realisasi dibuat 0% yang seharusnya adalah N/A; 2. Belum ada penjelasan mengenai rekomendasi untuk setiap indikator yang tidak mencapai target	Laporan hasil tindak lanjut yang seharusnya disampaikan Adalah Laporan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya	1. Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada namun nilai capaian kinerja masih diragukan karena terdapat perhitungan capaian kinerja yang masih belum sesuai dengan SK Sekma No 173 Tahun 2022 yaitu indikator perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi dan beberapa indikator yang dari analisa diketahui tidak ada perkara yang masuk/diajukan namun realisasi dibuat 0% seharusnya adalah N/A. 2. Pada monev rencana aksi tidak ada penjelasan uraian permasalahan dan rekomendasi detil untuk rencana aksi kedepan pada indikator yang tidak tercapai	1. Tidak ada data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja indikator Perkara Perdata yang diputus tepat waktu dan data perkara perdata yang ditampilkan tidak memberikan informasi tanggal minutasasi dan lama proses setiap perkara; 2. Data perkara pidana yang ditampilkan tidak memberikan informasi tanggal minutasasi dan lama proses setiap perkara; 3. Pengukuran capaian kinerja pada indikator Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative belum sesuai; dengan definisi IKU pada SK Sekma no 173 tahun 2022;

							<p>4. Pengukuran capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi belum sesuai dengan definisi IKU yang telah ditetapkan dalam SK 173 tahun 2022 sehingga nilai realisasi dan capaian masih diragukan;</p> <p>5. Tidak ada pengukuran capaian kinerja yang ditampilkan pada indikator Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan tepat waktu dan data perkara perkara yang ditampilkan tidak ada keterangan tanggal minutas dan tanggal pengiriman Salinan putusannya;</p>
3	PN Sigli	√	√	√	<p>Pada Laporan LHTL terdapat rekomendasi untuk mempertahankan kinerja, namun tidak ada penjelasan terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada kolom rencana aksi tindaklanjut.</p>	<p>Uraian progres pelaksanaan untuk tiap aksi per indikator kinerja belum menunjukkan progres kerja nyata yang telah dilakukan dalam mencapai target. Uraian permasalahan yang dihadapi untuk indikator yang tidak mencapai target juga tidak menjelaskan kendala nyata yang dihadapi dalam aksi/kegiatan yang telah dilakukan</p>	√
4	PN Bireuen	√	<p>1. Nilai realisasi dan capaian yang terdapat pada notula rapat monev berbeda dengan nilai yang diinput pada aplikasi SIMASKU;</p> <p>2. Berdasarkan isi notula belum terlihat pimpinan menyampaikan hasil dari monev capaian kinerja yang dilakukan apakah ada target yang tidak tercapai, alasan maupun rekomendasi pimpinan untuk perbaikan.</p>	<p>1. Nilai realisasi dan capaian yang terdapat pada BA Capaian Kinerja berbeda dengan yang diinput pada aplikasi SIMASKU dan notula monev capaian kinerja;</p> <p>2. Terdapat target yang tidak tercapai namun tidak ada rekomendasi perbaikan ke depannya;</p> <p>3. Tidak ada analisa keberhasilan dan kegagalan mencapai target.</p>	<p>Satker sudah membuat laporan tindak lanjut atas evaluasi kinerja per pegawai namun belum melampirkan laporan tindaklanjut hasil monev capaian kinerja satuan kerja sehingga belum terlihat apakah rekomendasi hasil monev telah dilaksanakan</p>	<p>Perhitungan capaian dan realisasi pada dokumen monev rencana aksi berbeda dengan yang diinput pada aplikasi SIMASKU, Notula Rapat dan BA Monev Capaian Kinerja.</p>	<p>1. Agar dapat menginformasikan jumlah seluruh perkara khusus yang diajukan kasasi maupun yang tidak</p> <p>2. Pada file excel yang dilampirkan perhitungan untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi menghitung seluruh perkara pidana dan perdata sehingga tidak sesuai dengan IKU.</p>

5	PN Lhoksukon	SS Komdanas sudah ada namun nilai realisasi dan hasil capaian triwulan III yang diinput pada aplikasi Simasku diragukan setelah menganalisa dokumen pendukung	Notulen rapat monev TW 3 sudah ada, namun terdapat nilai indikator yang seharusnya N/A dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani tetapi dibuat 0 % yaitu perkara Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	1. Terdapat nilai indikator yang seharusnya N/A dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani tetapi dibuat 0 % yaitu perkara Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi; 2. Rekomendasi untuk indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan belum mempertimbangkan tiga nilai terendah dari hasil survey.	Laporan hasil tindak lanjut yang seharusnya disampaikan adalah Laporan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya;	Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada namun terdapat nilai indikator yang seharusnya N/A dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani tetapi dibuat 0 % yaitu perkara Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	1. Tambahkan kolom tanggal minutas perkara pada <i>sheet</i> keadaan perkara pidana, perkara perdata dan pengiriman Salinan putusan; 2. Pada data perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu terdapat 1 perkara yang melebihi 5 bulan namun dihitung sebagai perkara tepat waktu, agar dibuat keterangan alasannya 3. Pengukuran kinerja untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tidak didukung dengan sumber data perkaranya ; 4. Pengukuran kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak didukung sepenuhnya dengan sumber data perkaranya;
6	PN Lhokseumawe	SS Komdanas sudah ada namun nilai realisasi dan hasil capaian triwulan III yang diinput pada aplikasi Simasku diragukan setelah menganalisa dokumen pendukung	Notulen rapat monev TW 3 sudah ada namun terdapat nilai indikator yang seharusnya N/A dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani tetapi dibuat 0 % yaitu indikator perkara Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	Berita Acara monev Capaian kinerja Triwulan III sudah ada namun terdapat nilai indikator yang seharusnya N/A dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani tetapi dibuat 0 % yaitu indikator Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	Laporan hasil tindak lanjut yang seharusnya disampaikan adalah Laporan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya	1. Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada namun terdapat nilai indikator yang seharusnya N/A dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani tetapi dibuat 0 % yaitu perkara Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi; 2. Terdapat perbedaan nilai realisasi indikator IKM yang diinput pada aplikasi simasku dengan data dukung yang disajikan.	1. Masih terdapat pengukuran kinerja indikator yang tidak disajikan hasil perhitungan realisasi dan capaian per triwulannya; 2. Terdapat perbedaan nilai IKM triwulan III pada file kinerja excell dengan yang diisi di aplikasi Simasku.

7	PN Takengon	√	√	<p>1. Terdapat kesalahan perhitungan untuk indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;</p> <p>2. Untuk perhitungan perkara diversi jika tidak ada perkara anak yang diajukan diversi maka capaian dapat dibuat N/A;</p> <p>3. Terdapat kesalahan perhitungan untuk indikator kinerja putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi);</p> <p>4. Tidak ada analisa keberhasilan dan kegagalan mencapai target.</p>	<p>1. Target pelaksanaan tindaklanjut monev tidak spesifik sehingga tidak dapat diukur pelaksanaannya;</p> <p>2. Monev TW III dan tindaklanjut monev TW III sudah dilaporkan namun capaian atas tindaklanjut monev TW III adalah capaian kinerja pada TW III;</p> <p>3. Satuan kerja agar terlebih dahulu membuat analisa hambatan ataupun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada laporan monev capaian kinerja sebelum dibuat laporan tindak lanjut agar tindaklanjut yang dilaporkan benar-benar berhubungan dengan peningkatan kinerja.</p>	<p>Hasil perhitungan untuk realisasi indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) tidak tepat sehingga upaya tindaklanjut yang dibuat pun tidak sesuai.</p>	<p>1. Pada tabel data perkara untuk indikator kinerja perkara tepat waktu agar dapat ditambahkan kolom tanggal minutasasi dan kolom lama proses yang menginformasikan waktu penyelesaian perkara dari pendaftaran s.d minutasasi;</p> <p>2. Data perkara tidak memuat detail perkara yang mengajukan banding;</p> <p>3. Data perkara tidak memuat detail perkara khusus yang mengajukan kasasi.</p>
8	PN Langsa	√	<p>Dokumen rapat sudah lengkap (sudah ada undangan, absensi dan notulen) namun foto kegiatan yang dilampirkan adalah foto kegiatan rapat pada TW II.</p>	<p>1. Terdapat ketidaksesuaian nilai antara tabel jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan penjelasan atas tabel;</p> <p>2. Terdapat ketidaksesuaian nilai antara tabel jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan penjelasan atas tabel;</p> <p>3. Terdapat perbedaan alasan tidak tercapainya target persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi, pada notula rapat disebutkan alasan kegagalan adalah karena tidak adanya kesepakatan antar pihak namun pada ba monev disebutkan bahwa tidak ada perkara anak yang diajukan diversi selama triwulan III. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan perhitungan realisasi dan capaian untuk indikator tersebut;</p> <p>4. Rekomendasi untuk indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan belum mempertimbangkan tiga nilai terendah dari hasil survey.</p>	<p>1. Laporan Hasil Tindak Lanjut yang disampaikan kurang tepat, jadwal tindaklanjut monev Triwulan III berdasarkan laporan adalah bulan Oktober-Desember 2025 namun sudah ada hasil tindaklanjutnya meskipun laporan dibuat pada tanggal 03 Oktober 2025;</p> <p>2. Rencana aksi tindak lanjut yang dibuat tidak berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan;</p> <p>3. Alasan kegagalan mencapai target untuk indikator diversi pada laporan LHTL dan BA Monev berbeda</p>	√	<p>1. Terdapat perbedaan jumlah perkara pidana yang putus tepat waktu pada tabel perbandingan dengan target jangka menengah (pada tabel perhitungan s.d TW III terdapat 223 perkara namun pada tabel perbandingan target jangka menengah hanya 218 perkara);</p> <p>2. Terdapat ketidaksesuaian perhitungan pada tabel perbandingan dengan target jangka menengah untuk indikator kinerja perkara anak yang diselesaikan secara diversi.</p>
9	PN Idi	√	√	<p>Dasar Hukum belum memuat Renstra Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Idi.</p>	<p>Tabel hasil pengukuran kinerja TW 2 dan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi TW 2, sedangkan pada judul sudah memasuki TW 3 namun informasi yang disampaikan masih TW 2.</p>	<p>Jumlah capaian untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi berbeda antara dokumen monev rencana aksi dan pengisian pada aplikasi SIMASKU.</p>	<p>1. Terdapat perkara perdata gugatan nomor 10/Pdt.G/2024/PN Idi yang diselesaikan dalam waktu 160 hari;</p> <p>2. Terdapat perkara perdata gugatan nomor 11/Pdt.G/2024/PN Idi yang diselesaikan dalam waktu 208 hari.</p>

10	PN Kuala Simpang	SS Komdanas sudah ada namun nilai realisasi dan hasil capaian triwulan III yang diinput pada aplikasi Simasku diragukan setelah menganalisa dokumen pendukung	Berdasarkan Notulen rapat monev TW 3 yang ditampilkan monev capaian kinerja yang dilaksanakan adalah untuk hasil pengukuran kinerja dan evaluasi capaian kinerja periode Januari sampai dengan September 2025 bukan untuk triwulan III (periode Juli – September 2025). Seharusnya yang diukur dan dimonev adalah untuk periode Triwulan III (Juli - September) Tahun 2025	Berita Acara monev Capaian kinerja Triwulan III tidak tepat karena analisa keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dibuat berdasarkan data capaian kinerja periode Januari – September 2025 bukan hasil capaian kinerja Triwulan III (periode Juli-September 2025);	√	Monev Rencana Aksi Triwulan III kurang tepat karena masih terdapat beberapa indikator yang analisa keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dibuat berdasarkan data capaian kinerja periode Januari – September 2025 bukan hasil capaian kinerja Triwulan III (periode Juli-September 2025);	1. Terdapat perbedaan nilai realisasi dan capaian pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada file kinerja excel dengan yang diinput pada Simasku; 2. Terdapat perbedaan nilai realisasi dan capaian pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada file kinerja excel dengan yang diinput pada Simasku;
11	PN Blangkejeren	SS Komdanas sudah ada namun nilai realisasi dan hasil capaian triwulan III yang diinput pada aplikasi Simasku diragukan setelah menganalisa dokumen pendukung	Notulen rapat monev TW III sudah ada, namun masih terdapat perbedaan hasil capaian yang diinput pada aplikasi simasku dengan data yang ditampilkan yaitu pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;	1. terdapat perbedaan hasil capaian yang ditampilkan pada file kinerja excel dengan data yang ditampilkan yaitu pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; 2. Rekomendasi untuk indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan belum mempertimbangkan tiga nilai terendah dari hasil survey.	Laporan hasil tindaklanjut Triwulan sebelumnya sudah ada namun informasi diragukan karena data monev Triwulan II yang ditampilkan dalam perhitungannya bukan untuk Triwulan II (April - Juni) melainkan data perkara dari bulan Januari – Juni tahun 2025.	Monev Renaksi Triwulan III Tahun 2025 sudah ada namun masih terdapat perbedaan hasil capaian yang diinput pada file kinerja excel dengan data yang ditampilkan yaitu pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;	Nilai realisasi indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tidak sinkron dengan nilai yang diinput pada aplikasi Simasku
12	PN Kutacane	√	Dokumen rapat monev sudah ada namun yang dilakukan tidak membahas capaian untuk seluruh indikator yang diperjanjikan dan hanya membahas indikator yang tidak berhasil mencapai target	Terdapat kesalahan perhitungan untuk indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi, berdasarkan data SIPP PN Kutacane terdapat 2 perkara yang berhasil mediasi namun pada BA Capaian Kinerja hanya 1 perkara yang dihitung sehingga realisasi dan capaiannya tidak diakui.	1. Lampirkan Laporan Hasil Tindak Lanjut Triwulan II 2025 2. Laporan Hasil Tindak Lanjut yang disampaikan kurang tepat, jadwal tindaklanjut monev Triwulan III berdasarkan laporan adalah bulan Oktober-Desember 2025 namun sudah ada hasil tindaklanjutnya	Terdapat kesalahan perhitungan untuk indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi, berdasarkan data SIPP PN Kutacane terdapat 2 perkara yang berhasil mediasi namun pada BA Capaian Kinerja hanya 1 perkara yang dihitung sehingga realisasi dan capaiannya tidak diakui.	Nilai realisasi indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tidak sinkron dengan nilai yang diinput pada aplikasi Simasku
13	PN Meulaboh	√	√	BA Capaian kinerja sudah ada tetapi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan diversi belum menjelaskan rekomendasi	Data dukung yang dilampirkan hanya menyampaikan rekomendasi dari tindak lanjut indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sedangkan tindaklanjut dari rekomendasi lainnya tidak melampirkan data dukungnya	Indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu terdapat perkara yang tidak tepat waktu tetapi tidak diuraikan uraian permasalahannya	√

14	PN Calang	√	1. Notulen rapat monev Triwulan 3 sudah ada namun analisa atas penyebab keberhasilan atau kegagalan serta tindaklanjut tidak dimonev untuk masing-masing indikatornya; 2. Terdapat analisa yang tidak sesuai dengan indikator yang dianalisa yaitu pada indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Rekomendasi untuk indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan belum mempertimbangkan tiga nilai terendah dari hasil survey.	Laporan hasil tindaklanjut tidak tepat, Laporan yang harusnya diberikan adalah Laporan hasil Tindak Lanjut triwulan sebelumnya	Monev Renaksi TW III Tahun 2025 sudah ada namun pada indikator yang tidak tercapai tidak dijelaskan analisa permasalahannya dan tindak lanjut kedepannya;	√
15	PN Sinabang	√	Notulen rapat monev Triwulan III sudah ada namun berdasarkan notulen yang ditampilkan masih terdapat indikator yang tidak tercapai tetapi tidak ada analisa penyebab dan rekomendasi kedepannya yaitu indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi	Berita Acara Monev sudah ada namun belum menjelaskan secara detil rekomendasi untuk indikator yang tidak mencapai target	Laporan hasil tindaklanjut sudah ada namun untuk indikator RJ dan indkator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi agar lebih jelas dalam menyampaikan analisa kendala/hambatan yang menyebabkan target tidak tercapai serta rekomendasi yang diperlukan dalam mencapai target tersebut	Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada, namun namun untuk indikator RJ dan indkator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi agar lebih jelas dalam menyampaikan analisa kendala/hambatan yang menyebabkan target tidak tercapai serta rekomendasi yang diperlukan dalam mencapai target tersebut	√
16	PN Tapaktuan	√	1. Notulen rapat monev capaian kinerja TW II Tahun 2025 sudah ada namun belum diikuti oleh seluruh pegawai; 2. Perhitungan capaian kinerja yang terlampir pada notula berbeda dengan nilai capaian yang diinput pada aplikasi SIMASKU; 3. Tidak ada rekomendasi pada indeks kepuasan masyarakat yang belum mempertimbangkan 3 nilai terendah dari hasil survey;	Rekomendasi pada indeks kepuasan masyarakat yang belum mempertimbangkan 3 nilai terendah dari hasil survey;	Tabel hasil pengukuran kinerja TW 2 dan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi TW I, sedangkan informasi yang seharusnya disampaikan TW III.	√	Indikator persentase salinan putusan sudah ada namun tabel nomor surat tidak usah ditampilkan dan lama proses pengirimannya tetap diisi.

17	PN Singkil	√	<p>1. Pada indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya banding data yang ditampilkan tidak memberikan informasi jumlah perkara pidana dan perdata yang tidak diajukan Upaya hukum banding serta analisa yang ditampilkan hanya untuk perkara perdata saja.</p> <p>2. Pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi data yang ditampilkan tidak memberikan informasi jenis perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi, merujuk pada SK Sekma no 173 tahun 2022 bahwa pada indikator ini menggunakan perkara khusus diantaranya perkara pidana yang diputus bebas murni dan perkara perdata permohonan, selain itu pada analisa keberhasilan masih terdapat ketidaksinkronan dengan data yang digunakan dalam indikator ini.</p>	<p>Berita Acara monev capaian kinerja triwulan III sudah ada namun terdapat indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi data yang ditampilkan tidak memberikan informasi jenis perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi, merujuk pada SK Sekma no 173 tahun 2022 mengenai IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama bahwa pada indikator ini menggunakan perkara khusus diantaranya perkara pidana yang diputus bebas murni dan perkara perdata permohonan, selain itu pada analisa keberhasilan masih terdapat ketidaksinkronan dengan data yang digunakan dalam indikator ini</p>	<p>Laporan hasil tindak lanjut Triwulan II sudah ada namun masih terdapat 2 indikator yang tidak tercapai di triwulan sebelumnya tetapi tidak ada laporan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah direncanakan</p>	√	√
18	PN Jantho	√	<p>1. Dasar Hukum belum memuat Renstra, IKU dan PKT .</p> <p>2. Tidak ada rekomendasi pada indeks kepuasan masyarakat dan belum mempertimbangkan 3 nilai terendah dari hasil survei.</p>	<p>Tidak ada rekomendasi pada indeks kepuasan masyarakat dan belum mempertimbangkan 3 nilai terendah dari hasil survei.</p>	<p>Tindak lanjut yang dilakukan untuk pemenuhan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada capaian target berbeda dengan berbeda dengan berita acara capaian kinerja dan notulen</p>	<p>Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada namun masih terdapat indikator yang tidak tercapai targetnya namun pada uraian progres pelaksanaannya tidak disampaikan keseluruhan.</p>	√
19	PN Simpang Tiga Redelong	√	<p>1. Pada notulen tidak terdapat pemaparan nilai realisasi dan capaian setiap indikator untuk Triwulan III Tahun 2025</p> <p>2. pada notulen tidak terdapat hasil analisa capaian kinerja per indikator</p>	<p>1. BA Capaian Kinerja Triwulan II sudah ada namun terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil capaian Triwulan III pada aplikasi Simasku</p> <p>2. Tidak terdapat hasil analisa capaian kinerja per indikator</p>	<p>1. Laporan Hasil Tindak Lanjut yang disampaikan tidak menganalisa permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut per indikator</p> <p>2. Laporan Hasil Tindak Lanjut yang disampaikan tidak tepat tidak melampirkan bukti data dukung telah ditindaklanjuti</p>	<p>Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada, namun aksi kegiatan yang disampaikan tidak keseluruhan untuk setiap indikatornya sehingga tidak tampak kendala pada indikator yang tidak mencapai target</p>	<p>Tidak ada list data perkara selesai mediasi yang ditampilkan</p>

20	PN Blangpidie	SS Komdanas sudah ada namun nilai realisasi dan hasil capaian triwulan III yang diinput pada aplikasi Simasku diragukan setelah menganalisa dokumen pendukung	1. perhitungan capaian kinerja yang masih belum sesuai yaitu indikator perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi; 2. Selain itu dalam rapat monev tidak ada pembahasan mengenai analisa keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi untuk target kinerja yang tidak tercapai;	1. Nilai capaian kinerja masih diragukan karena terdapat perhitungan capaian kinerja yang masih belum sesuai yaitu indikator perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi; 2. Analisa capaian kinerja pada indikator putusan yang menggunakan pendekatan RJ tidak sinkron dengan data yang ada pada File kinerja excel; 3. Analisa keberhasilan/kegagalan tidak dijelaskan pada masing-masing indikator 4. Agar Rekomendasi kedepan dijelaskan pada masing-masing indikator	Laporan hasil tindaklanjut yang seharusnya disampaikan adalah Laporan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya	1. Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada namun nilai capaian kinerja masih diragukan karena terdapat perhitungan capaian kinerja yang masih belum sesuai yaitu indikator perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi. 2. Pada monev rencana aksi tidak ada penjelasan uraian permasalahan dan rekomendasi detil untuk rencana aksi kedepan pada indikator yang tidak tercapai	1. Tambahkan kolom tanggal minutas perkara pada sheet keadaan perkara pidana, perkara perdata dan pengiriman Salinan putusan; 2. Pengukuran capaian kinerja untuk indikator perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi belum sesuai dengan definisi IKU yang telah ditetapkan dalam SK Sekma no 173 tahun 2022 sehingga nilai realisasi dan capaian masih diragukan;
21	PN Meureude	√	√	Berita Acara Monev Capaian kinerja sudah ada namun belum secara rinci menjelaskan rekomendasi yang akan dilakukan untuk mencapai target kedepannya	√	√	√
22	PN Suka Makmue	SS komdanas sudah ada, namun terdapat kesalahan penginputan nilai realisasi kinerja pada aplikasi Simasku, nilai yang seharusnya diinput adalah nilai realisasi kinerja bukan nilai capaian kinerja	Notulen rapat monev TW 3 sudah ada namun berdasarkan notulen tersebut dalam rapat monev tidak ada menjelaskan secara detil mengenai analisa keberhasilan/ kegagalan serta rekomendasi untuk target kinerja indikator yang tidak tercapai;	1. Terdapat beberapa analisa keberhasilan/kegagalan yang tidak sinkron dengan hasil capaian kinerja; 2. Agar Rekomendasi kedepan dapat dijelaskan untuk setiap indikator	Laporan hasil tindaklanjut yang seharusnya disampaikan Adalah Laporan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya	Monev Rencana Aksi Triwulan III sudah ada namun belum ada penjelasan uraian permasalahan dan rekomendasi detil untuk rencana aksi kedepan pada indikator yang tidak tercapai	√

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh


NURSYAM



Banda Aceh, 13 November 2025
Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran


RELIA NOVITA RAHIM